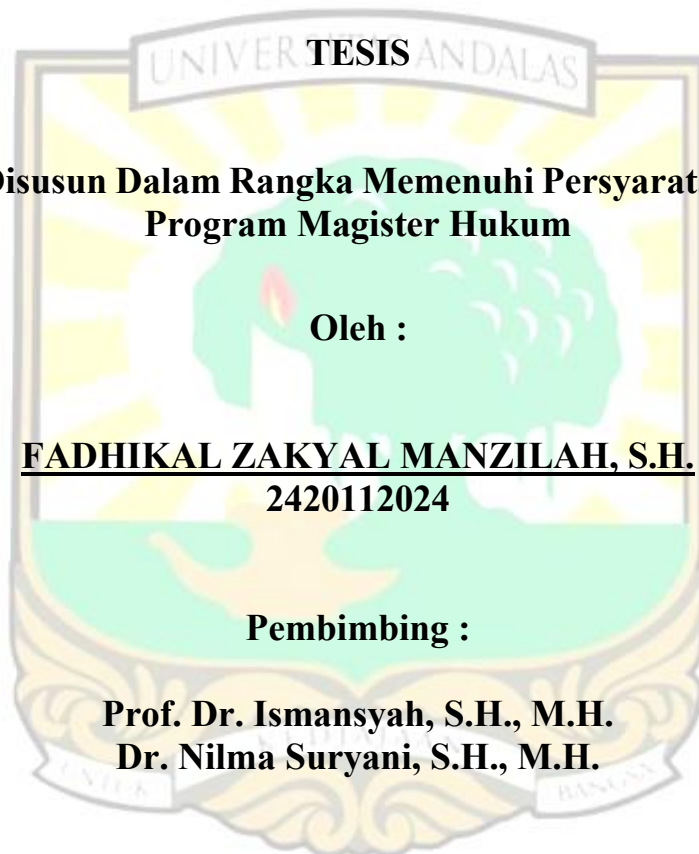




**PENERAPAN PASAL 603 DAN PASAL 604
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB PIDANA PEJABAT NEGARA ATAS KERUGIAN
NEGARA TANPA UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

FADHIKAL ZAKYAL MANZILAH, S.H.
2420112024

Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg:
08/MH/IV/2026

PENERAPAN PASAL 603 DAN PASAL 604 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PIDANA
PEJABAT NEGARA ATAS KERUGIAN NEGARA TANPA UNSUR MEMPERKAYA DIRI
SENDIRI

*THE APPLICATION OF ARTICLES 603 AND 604 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 IN SUPREME
COURT DECISIONS RELATING TO THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PUBLIC OFFICIALS
FOR STATE FINANCIAL LOSSES IN THE ABSENCE OF PERSONAL ENRICHMENT*

Disusun Oleh:

Author:

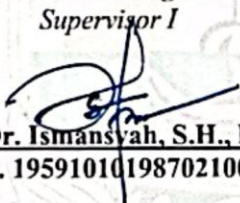
Fadhikal Zakyal Manzilah
2420112024

Program Studi : Magister Hukum
Study Program : Master of Law

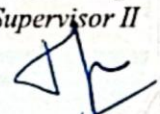
Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On August 14th, 2026
And Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:*

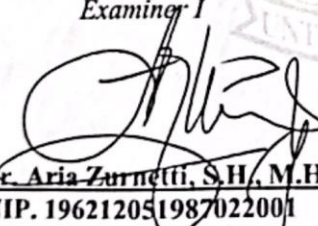
Pembimbing I
Supervisor I


Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP. 195910101987021002

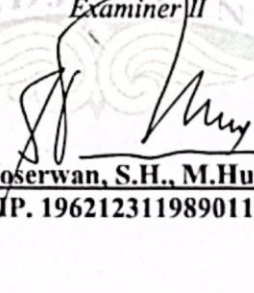
Pembimbing II
Supervisor II


Dr. Nilma Survani, S.H., M.H.
NIP. 197407241999032004

Penguji I
Examiner I


Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

Penguji II
Examiner II


Dr. Yoserwan, S.H., M.Hum., LL.M.
NIP. 196212311989011002

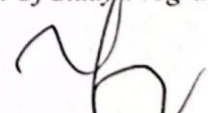
Penguji III
Examiner III


Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.
NIP. 197905182005011003

Dekan
Dean


Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program


Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

PENERAPAN PASAL 603 DAN PASAL 604 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PEJABAT NEGARA ATAS KERUGIAN NEGARA TANPA UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

**(Fadhikal Zakyal Manzilah 2420112024, Dosen Pembimbing I :
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II : Dr. Nilma Suryani,
S.H., M.H. Magister Hukum, Universitas Andalas, 2026, 134 Halaman)**

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana pejabat negara atas kerugian keuangan negara menjadi isu penting pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait Pasal 603 dan Pasal 604 yang mensyaratkan adanya unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi”. Permasalahan muncul ketika kerugian negara terjadi tanpa adanya unsur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: (A) penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 terhadap pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri; (B) tafsir dan pendekatan pengadilan terhadap unsur memperkaya diri; serta (C) bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat dalam kerangka keseimbangan sanksi pidana dan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat deskriptif-analitis melalui studi terhadap putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (A) penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 mensyaratkan terpenuhinya unsur memperkaya diri sebagai elemen esensial delik, sehingga apabila unsur tersebut tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana menjadi terbatas. (B) Tafsir pengadilan cenderung menempatkan unsur memperkaya diri secara ketat dan restriktif, dengan menuntut adanya bukti konkret mengenai adanya keuntungan yang diperoleh pelaku atau pihak lain. (C) Dalam kondisi tidak terpenuhinya unsur tersebut, bentuk pertanggungjawaban hukum lebih tepat diarahkan pada sanksi administratif, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan jabatan, tanpa menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan personal yang nyata. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman penafsiran yang lebih tegas serta harmonisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Negara, Kerugian Negara.

THE APPLICATION OF ARTICLES 603 AND 604 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 IN SUPREME COURT DECISIONS RELATING TO THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PUBLIC OFFICIALS FOR STATE FINANCIAL LOSSES IN THE ABSENCE OF PERSONAL ENRICHMENT

**(Fadhikal Zakyal Manzilah 2420112024, Principal Supervisor :
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., Co-Supervisor : Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.
Master Of Law Program, Universitas Andalas, 2026, 134 Pages)**

ABSTRACT

The criminal liability of state officials for losses to state finances has become a significant issue following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly in relation to Articles 603 and 604 which require the element of “enriching oneself, another person, or a corporation.” Problems arise when state financial losses occur without the presence of such an element. This study aims to address: (A) the application of Articles 603 and 604 to state officials who cause state financial losses without the element of self-enrichment; (B) the interpretation and judicial approach toward the element of self-enrichment; and (C) the appropriate form of legal liability within the framework of balancing criminal and administrative sanctions. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, and is descriptive-analytical in nature, based on the examination of decisions of the Supreme Court and lower courts. The findings indicate that: (A) the application of Articles 603 and 604 requires the fulfillment of the element of self-enrichment as an essential component of the offense, such that in the absence of this element, criminal liability becomes limited; (B) judicial interpretation tends to construe the element of self-enrichment strictly and restrictively, requiring concrete evidence of benefit gained by the perpetrator or another party; and (C) in the absence of such an element, the appropriate form of legal liability is more suitably directed toward administrative sanctions, particularly in cases involving abuse of authority, without excluding the possibility of criminal liability where personal fault is evident. This study recommends the need for clearer interpretative guidelines and harmonization between criminal law and administrative law to ensure legal certainty, justice, and the effectiveness of law enforcement.

Keywords : Criminal Liability, State Officials, State Financial Losses.